

65

MEMAHAMI KONFLIK DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG BEBERAPA TEORI

Oleh : AKP. Azwar, S. Sos.

Mhs. Pascasarjana (S-2) Kriminologi

Fisip-Universitas Indonesia

Tahun 2001/2002

1. Konflik Sampit (Suku Dayak dan Madura) : Suatu Tinjauan Teori Konflik Sosial Ralf Dahrendorf.

a. Karakteristik Suku Dayak dan Suku Madura.

Karakteristik Suku Dayak, sebagian besar suku Dayak berdiam di wilayah pedalaman Kalimantan. Suku Dayak terdiri dari beberapa sub suku antara lain: Maayan, Ngaju, Dusun Deyah, Lawangan, Mulut dan Bahau. Jumlah keseluruhan orang Dayak diperkirakan 200 jiwa. Tiap sub suku memiliki bahasa tersendiri, orang Mahayan menggunakan bahasa Mahayan, orang Ngaju menggunakan bahasa Ngaju dan sebagainya. Mata pencaharian utama mereka bercocok tanam di ladang dan di sawah, disamping itu mereka berburu dan menangkap ikan serta memanfaatkan hasil hutan. Penghormatan terhadap nenek moyang berkaitan erat dengan sistem kepercayaan mereka. Sistem kepercayaan masyarakat Dayak meliputi kepercayaan terhadap roh disebut dengan *Kaharingan*. Suatu kebanggaan memenggal kepala musuh dan membuat tanda di badannya, sehingga makin banyak tanda di badan suku Dayak tersebut makin tinggi status sosialnya.

Karakteristik Suku Madura. Suku Madur sebagai suku pendatang sangat ulet berusaha disegala bidang pekerjaan mulai dari pekerja kasar sampai dengan pegawai negeri sipil, menimbulkan dominasi pekerjaan dan menambah sempitnya peluang pekerjaan untuk suku Dayak. Masyarakat suku Madura

rata-rata cenderung bertemperamen tinggi dan di Sampit serta Palangkaraya masyarakat Madura hidup secara berkelompok-kelompok.

b. Beberapa Pokok Pikiran Teori Konflik Sosial Ralf Dahrendorf.

* Dahrendorf menganalisa masyarakat dari perspektif konflik sosial, dimana dalam kehidupan masyarakat terdapat dua kategori yaitu, orang yang berkuasa (Superordinat) dan orang yang dikuasai (Subordinat). Dualisme ini, menurut Dahrendorf mengakibatkan adanya kepentingan yang berbeda-beda dan mungkin saling berlawanan, pada gilirannya melahirkan kelompok yang saling bertentangan.

* Konflik senantiasa terjadi pada suatu masyarakat karena adanya otoritas pada suatu asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif (Imperatively Coordinated Association/ICA) yaitu himpunan individu-individu yang digabungkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai himpunan (association) individu-individu dan secara paksa ditempatkan dalam suatu orde.

* Struktur otoritas organisasi sebagai dasar pokok dalam pembentukan kelas, orang yang menjalankan otoritas dan yang tunduk pada otoritas tersebut, pasti mempunyai kepentingan yang saling berbeda.

c. Mengapa Konflik Sampit Terjadi, Ditinjau dari Teori Konflik Sosial Ralf Dahrendorf dengan Menggunakan Analisa Imperatively Coordinated Association/ICA)

Analisa Imperatively Coordinated Association/ICA merupakan suatu sistem yang selalu ada dalam semua tipe organisasi sosial ataupun sistem sosial. Berdasarkan pada asumsi sosial bahwa semua sistem sosial dikoordinasikan secara imperatif, dalam hal ini konflik antara Suku Dayak dengan Suku Madura di Sampit dapat dianalisa melalui ICA ini ; Relasi peran terlegitimasi dalam ICA, yaitu peran-peran yang diberikan selama ini oleh masyarakat kepada pemegang otoritas, dalam hal ini elite-elite lokal Pemda Kotim masih dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat Dayak, maupun masyarakat Madura. Biarpun otoritas legitimasi itu banyak didominasi oleh masyarakat keturunan Madura di Kab. Kotim (Kota Sampit) serta sering menguntungkan kepentingan kelompok tertentu. Adanya dikatomi hubungan otoritas antara peran dominan dan bawahan, yaitu relasi hubungan telah mulai dibatasi dengan adanya dikatomi antara masyarakat dominan (Superordinat) dalam hal ini masyarakat suku Madura dengan masyarakat yang dimarginalkan (Subordinat) dalam hal ini masyarakat Dayak, yang merupakan masyarakat asli daerah. Dikatomi ini telah melebar dalam segala bentuk kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kota Sampit dan sekitarnya. Seperti : Untuk mendapatkan proyek, khususnya di kota Sampit selalu dimenangkan dari etnis suku Madur, penambangan liar (pencurian kayu) sering dilakukan dari kalangan etnis suku Madura, Penambangan emas secara liar (PETI) pada umumnya didominasi oleh suku Madur, tanpa adanya suatu upaya pendistribusian secara merata dan penindakan secara tegas terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah. Kemudian adanya issue di jajaran Pemda TK. II Kotim bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2001 akan diadakan

pelantikan Kepala Dinas, dimana jabatan tersebut banyak didominasi oleh warga keturunan suku Madura tanpa melibatkan putra daerah, baik yang beragama Islam maupun Kristen. Hal itu juga menunjukkan adanya dikatomi, tidak meratanya persebaran sumber daya langka serta tidak konsistennya persebaran otoritas antara suku Madura dan suku Dayak. Pertentangan semu antar kelompok, yaitu pertentangan semu mulai muncul antara masyarakat Madura dengan masyarakat Dayak. Sikap dan sifat saling mencurigai dan saling tidak percaya mulai tumbuh diantara suku yang bertikai tersebut. Akibatnya, sikap ketidakpercayaan tersebut menjadi luas kearah ketidakpercayaan terhadap elite-elite yang memegang otoritas di Kab. Kotim (Sampit), yang didominasi oleh masyarakat keturunan Madura. Masyarakat Dayak juga mulai mempertanyakan legitimasi otoritas yang diberikan selama ini dan ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber langka. Berkembangnya kepedulian tentang kepentingan bagi kelompok berkepentingan yaitu dalam hal ini masyarakat Dayak menyadari akan perlunya memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka, selama ini masyarakat Dayak dianggap sebagai masyarakat yang selalu kalah, masyarakat marginal, masyarakat tersingkir dan masyarakat yang tertekan. Masyarakat Dayak mulai bersepakat untuk melakukan perubahan, sementara suku Madur berusaha pula untuk mempertahankan status quo demi kepentingan masyarakat Madura. Terciptanya konflik kelompok, yaitu konflik ini masih bisa diselesaikan dan akibat konflik tersebut belum begitu meluas, seperti; keributan-keributan kecil di Pasar Sampit, keributan kecil di Pelabuhan Sampit, keributan kecil antara tukang becak (suku Madura) dengan penumpang (suku

Dayak atau Melayu) serta saling mengejek antara suku Madura dengan suku Dayak.

Konflik menjadi terbuka, yaitu Masa saat terjadinya konflik terbuka secara besar-besaran dari tanggal 18 s/d 25 Februari 2001, terjadi beberapa peristiwa di Sampit dan Palangkaraya sebagai berikut : *Penyerangan oleh suku Dayak terhadap etnis Madura, korban 4 orang MD dan 2 LB, Penemuan 3 mayat dari suku Dayak, Penemuan 247 mayat dari etnis Madura, Penemuan 53 mayat yang belum diketahui identitasnya, Jumlah pengungsi 14.872 orang dari etnis Madura, Pembakaran 174 rumah milik etnis Madura, Pembakaran becak, ruko dan lain-lain milik etnis Madura (Sbimmas Polri, 2001 : 11).*

Pendistribusian kembali kekuasaan dalam ICA. Disini konflik antara suku Madura dengan Suku Dayak dicoba untuk diselesaikan, dengan cara seruan damai bagi kedua belah pihak yang bertikai, penambahan kekuatan anggota Polri dan TNI, penangkapan para aktor serta provokator, kunjungan Kapolri, Kunjungan Menkopolsoskam serta kunjungan Wakil Presiden pada waktu itu Ibu Megawati Soekarnoputeri serta imbauan-imbauan perdamaian, berasal dari tokoh masyarakat dan tokoh agama Madura dan tokoh masyarakat Dayak, mengungsikan untuk sementara masyarakat Madura yang ada di kota Sampit dan Palangkaraya dan sekitarnya ke Madura dan Surabaya, agar korban jiwa terhadap masyarakat Madura dapat dihindari. Analisa ini berdasarkan kepada ICA (Imperatively Coordinated Association/ICA), menurut Ralf Dahrendorf, siklus ini akan kembali lagi ke premis yang pertama. Begitulah seterusnya, dimana konflik sosial didalam masyarakat menurut Ralf Dahrendorf tidak akan pernah berhenti tetapi konflik tersebut dapat diarahkan ke nilai yang positif seras ditekan seminimal mungkin.

2. Konflik Sampit (Suku Dayak dan Madura) : Suatu Tinjauan Teori Pertukaran Peter Blau.

a. Beberapa pokok pikiran teori pertukaran Peter Blau.

* Perbedaan status muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam transaksi pertukaran dengan status yang lebih tinggi dari mereka.

* Legitimasi suatu struktur tidak menjamin bahwa para anggotanya terus-menerus merasa puas dengan pemimpinnya, atau mengikuti tuntutan apa saja yang diberikan pemimpin itu.

* Dalam jangka panjang, struktur kekuasaan dan otoritas bergantung pada hasil perbandingan cost-reward yang menguntungkan semua anggota. Kalau hasil cost-reward konsisten dengan harapan semua anggota atau kalau hasil itu lebih menguntungkan dari pada yang bisa diperolehnya di tempat lain, para anggota-anggota itu akan cenderung menerima pemimpin itu sebagai orang yang jujur, dan terus mempertahankan pola pertukaran yang sudah ada.

* Tapi kalau hasil cost-reward itu kurang menguntungkan, atau harapan-harapan para anggota berubah, mereka mungkin akan marah dan melawan atau menolak tuntutan pemimpin itu. Mereka merasa kecewa dengan imbalan yang diterima, dibandingkan dengan ketaatan yang mereka lakukan. Hal ini akan mengakibatkan pembentukan gerakan oposisi, dan dalam kasus ekstrim, masyarakat yang dirugikan ingin merombak struktur kekuasaan yang ada.

b. Mengapa Konflik Sampit Terjadi Menurut Tinjauan Teori Pertukaran Peter Blau.

Dari segi sosial ekonomi maupun dalam otoritas elite pemerintahan di kota Sampit, masyarakat Madura lebih dominan daripada

masyarakat Dayak. Perekonomian di pasar-pasar sampai buruh kasar di pelabuhan Kota Sampit dikuasai oleh etnis pendatang suku Madura. Masyarakat Dayak sebagai masyarakat asli, banyak tinggal di hutan-hutan dan daerah pinggiran Kota Sampit dengan hidup yang sangat sederhana. Mereka selalu tergantung kepada kehidupan lingkungan alam sekitarnya, begitu pula roda pemerintahan di Kota Sampit, banyak didominasi oleh masyarakat keturunan Madura. Tentu saja kebijaksanaan yang lahir cenderung menguntungkan masyarakat pendatang (Madura). Akibatnya muncul perbedaan status antara masyarakat Madura dengan masyarakat Dayak sebagai akibat dari perbedaan dalam transaksi pertukaran tadi.

Hal itu akan menimbulkan akumulasi permasalahan antara masyarakat Dayak dengan suku Madura, masyarakat Dayak selalu dalam posisi yang dianggap kalah. Akumulasi penderitaan dan kekalahan masyarakat Dayak tersebut, memunculkan ketidakpuasan terhadap legitimasi suatu struktur pemerintahan di Kota Sampit yang didominasi oleh elite-elite lokal keturunan Madura. Masyarakat Dayak tidak akan mengikuti apa saja bentuk tuntutan yang diberikan oleh aparat Pemda Kotim sehingga pada titik puncaknya, ketidakpercayaan masyarakat Dayak tersebut akan mempertanyakan legitimasi otoritas pemerintahan yang diberikan kepada sekelompok elite yang berkuasa di Kab. Kotim (Kota Sampit). Masyarakat Dayak telah mulai menilai otoritas elite dan kekuasaan dari cost-reward yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Dayak. Kalau hasil cost-reward konsisten dengan harapan semua anggota atau kalau hasil itu lebih menguntungkan daripada yang bisa diperolehnya ditempat lain, Masyarakat Dayak di Kota Sampit dan sekitarnya akan cenderung menerima pimpinan yang berkuasa

di Kab. Kotim itu, sebagai elite yang jujur dan bahkan terus untuk mempertahankan pola pertukaran yang sudah ada. Tapi kalau hasil cost-reward itu kurang menguntungkan bagi masyarakat Dayak, sebagai masyarakat asli dan hanya menguntungkan terhadap masyarakat pendatang yang ada di Kota Sampit, maka masyarakat Dayak merasa dilecehkan dan akan marah, melawan atau menuntut legitimasi kepemimpinan maupun tuntutan-tuntutan dari elite Pemda Kotim. Masyarakat Dayak merasa kecewa dengan imbalan yang diterima selama ini, dibandingkan dengan ketaatan serta legitimasi kepemimpinan yang mereka berikan terhadap elite-elite Pemda Kotim. Hal ini akan mengakibatkan pembentukan gerakan oposisi. Untuk kasus ekstrim, masyarakat Dayak berkeinginan untuk merombak struktur kekuasaan serta mempertanyakan legitimasi kekuasaan yang diberikan mereka selama ini. Akibatnya konflik-konflik yang pada awalnya kecil, berubah menjadi konflik besar dan terbuka. Permasalahan konflik antara suku Madura dan suku Dayak di Sampit dan Palangkaraya tidak meletus begitu saja, tetapi berawal dari konflik-konflik laten dan puncaknya, timbul konflik secara terbuka *dari tanggal 18 s/d 25 Februari 2001 yang telah banyak menelan korban jiwa, harta benda dan beban psikologis yang sangat memprihatinkan serta menyedihkan*. Peristiwa ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua dan kita berharap peristiwa serupa jangan sampai terulang lagi, baik di Sampit, Palangkaraya maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Bagaimanapun juga masyarakat yang menjadi korban itu adalah saudara dan masyarakat kita sendiri.

3. Bagaimana Cara Mengatasi Konflik di Sampit-Kalteng.

Konflik dan sifat antagonis tidak dapat

dilenyapkan karena keduanya tertanam dalam struktur hubungan otoritas. Usaha untuk menyangkal konflik hanya membuatnya tertekan ke bawah permukaan, dimana dia bisa mendidih perlahan-lahan dan menjadi panas, dan tidak diketahui untuk jangka waktu yang lama dan pelan-pelan akan meledak keluar. Maka dalam hal ini perlu diadakan rekonsiliasi antara masyarakat Madura dan masyarakat Dayak, menciptakan agar kedua belah pihak etnis yang bertikai, dapat kembali hidup berdampingan secara damai, menciptakan iklim dimana tidak ada pihak manapun sebagai pihak yang kalah maupun sebagai pihak yang menang/unggul. Pihak yang bersalah baik etnis Madura maupun etnis Dayak yang melakukan pelanggaran harus ditindak secara tegas, Masyarakat Madura sebagai masyarakat pendatang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat, ta'at mengikuti budaya dan kebiasaan setempat. Disamping itu kesejahteraan materiil, jaminan sosial ekonomi dari masyarakat suku Dayak yang jauh berbeda dengan masyarakat Madura harus dapat dipenuhi, melalui peningkatan kualitas masyarakat Dayak, baik di bidang sosial, ekonomi, kemudian peluang memperoleh pekerjaan dan pendidikan, serta untuk mendapatkan proyek-proyek dari Pemda Kotim tidak ada diskriminasi antara masyarakat Dayak dengan masyarakat Madura. Kedua kelompok yang bertikai harus dapat menerima segala peraturan yang telah dirumuskan atau disepakati secara bersama. Setiap terjadinya ketegangan di masyarakat, sesegera mungkin dilakukan upaya-upaya untuk mengantisipasinya sejak dini, agar tidak meluas menjadi konflik yang besar. Dan pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur jalannya pemerintahan, memberikan persamaan keadilan dan pendistribusian sumber-sumber alam secara merata. Kalau hal itu dapat diwujudkan, maka konflik akan bisa ditekan pada tingkat

yang paling kecil. Walaupun dalam teorinya Dahrendorf mengatakan bahwa penyelesaian konflik akan menimbulkan konflik baru.

4. Konflik Ambon (Maluku) : Suatu Tinjauan Teori Konflik Lewis Coser.

a. Gambaran Umum Kota Ambon dan Sekitarnya.

Berdasarkan data kependudukan, Komposisi penduduk dan agama di Kodya Ambon, sebagai berikut : a. Islam 132.215 jiwa (42,38%), b. Kristen Protestan 161.977 jiwa (51,92%), Katolik 17.315 jiwa (5,55%) dan lainnya 797 jiwa (0,25%) (H.D.Brototanoyo, 2001 : 74). Berdasarkan pengelompokan golongan agama, penduduk Ambon terdiri atas dua golongan utama yaitu yang beragama Islam dan Kristen. Sedangkan yang beragama Katolik jumlahnya tidak sebanding dengan yang beragama Islam dan Kristen. Secara pranata, Gereja Katolik lebih utuh apabila dibandingkan dengan penganut Islam dan Kristen Protestan. Penganut Islam dan Kristen Protestan masing-masing terdiri atas aliran-aliran dari yang moderat sampai dengan yang fanatik berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan hubungannya dengan agama-agama lainnya. Gereja Katolik dalam berbagai konflik mengambil posisi moderat dibandingkan dengan umat Protestan dan Umat Islam.

b. Beberapa Pokok Pikiran Teori Konflik Lewis Coser.

* Dalam suatu masyarakat ada kelompok-kelompok yang saling bertikai.

* Perselisihan tersebut selalu mengenai nilai-nilai.

* Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok internal dalam suatu masyarakat, akan bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar.

* Kalau tidak ada prosedur yang mantap untuk menerima atau merembukan kepentingan-kepentingan yang saling ber-

tentangan itu, kekerasan mungkin satu-satunya pilihan.

* Pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokan, merugikan dan menghancurkan lawan.

e. Mengapa Konflik Ambon Terjadi Menurut Tinjauan Teori Konflik Lewis Coser.

Kerusuhan di Ambon, ternyata telah menjadi peristiwa besar dan telah banyak menelan korban jiwa serta harta benda yang tidak terhitung jumlahnya. Di Kota Ambon masyarakat Bugis, Buton dan Makasar (BBM) merupakan masyarakat mayoritas dibandingkan dengan penduduk asli asal Ambon, baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Mereka menguasai tempat-tempat perekonomian dan pasar, secara politik lokal dan nasional mereka juga menguasai berbagai kebijaksanaan, penguasaan dan pendistribusian sumber-sumber daya yang ada (sumber daya langka) di kota Ambon dan sekitarnya. Warga masyarakat asal hanya sebagai konsumen dan pengguna jasa (H.D. Brototanoyo, 2001 : 75). Permasalahan ini menimbulkan konflik kepentingan (Conflic of Interest) antara masyarakat BBM dengan masyarakat asli Ambon. Masalah ini menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat asli Ambon. Adanya stereotipe yang dikembangkan terhadap orang Ambon sebagai orang pemalas, hanya menghabiskan uang dan waktu untuk minum-minum sampai mabuk, gengsi tinggi dan tidak mau kerja kasar (tidak mau berjualan, apalagi berjualan di kaki lima, tidak mau menjadi cleaning service, tidak mau menjadi kuli pengangkut barang, tidak mau menjadi tukang becak dan sebagainya), maunya menjadi pegawai negeri atau TNI walau gaji kecil tetapi gengsi tinggi. Sebaliknya orang-orang Bugis, Buton dan Makasar adalah pekerja keras dan rajin, mau mengerjakan apa saja dan merekalah yang membangun

kota Ambon. Tetapi masyarakat Ambon juga mempunyai stereotipe terhadap orang-orang Bugis, Buton dan Makasar yaitu sebagai preman dan mafia. Berdasarkan teori konflik Lewis Coser, dari uraian diatas, *telah mulai munculnya kelompok-kelompok yang bertikai dan perselisihan akan nilai-nilai, diantara masyarakat asli Ambon dengan masyarakat BBM. Permasalahan tersebut juga akan memunculkan kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok internal bertambah tinggi, tingkat permusuhan atau konflik antar kelompok yang bertikai bertambah besar, baik terhadap masyarakat Ambon asli maupun terhadap masyarakat BBM. Kekompakan yang semakin tinggi dari masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik (Masyarakat Ambon dengan BBM), membantu memperkuat batas antara kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu. Kondisi-kondisi itu memunculkan kecenderungan bagi masyarakat yang bertikai untuk hidup berkelompok berdasarkan agama dan adat-istiadat mereka. Sehingga ada desa-desa yang homogen Islam disebut dengan Siri-Sori Islam dan desa-desa lainnya yang homogen Kristen disebut dengan Siri-Sori Kristen. Sedangkan di kota Ambon pengelompokan kesatuan hidup berdasarkan agama juga terjadi, penduduk yang mayoritas beragama Kristen, ada di wilayah Kudamati, Soya, Batu Gajah dan Silale sedangkan penduduk mayoritas beragama Islam banyak berdomisili di Batu Merah. Jadi Konflik antar kelompok meningkatkan solidaritas internal dalam kelompok-kelompok yang bertikai itu.*

Kemudian Lewis Coser mengemukakan, kalau tidak ada prosedur yang mantap untuk menerima atau merembukan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan itu, kekerasan mungkin satu-satunya pilihan, sehingga kelompok-kelompok yang dirugikan dalam masyarakat itu dapat dide-

ngar suaranya. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya konflik di Ambon dan sekitarnya, *suatu peristiwa yang hanya bermula dari sebuah perkelahian biasa di pagi hari menyongsong Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 22 Nopember 1998 sekarang telah melebar menjadi masalah besar.* Bukan saja menjadi masalah Ambon sendiri, tetapi telah menjadi masalah nasional bahkan sampai menjurus ke arah disintegrasi bangsa. Pihak-pihak yang bertikai tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan (Sumber Daya Langka), melainkan juga memojokan, merugikan dan menghancurkan lawan. Hal itu dapat dilihat dari akibat dari kerusuhan Ambon *sejak terjadinya pada tanggal 22 Nopember 1998 hingga saat ini telah menelan korban yang cukup banyak, begitu juga kerugian materil dan beban psikologis yang harus dipikul oleh masyarakat kedua belah pihak yang bertikai.*

5. Bagaimana Cara Mengatasi Konflik Ambon.

Menurut Lewis Coser, *menekan konflik tidak menghilangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Strategi untuk menghadapi konflik dengan merembukan perbedaan-perbedaan itu, kepentingan yang berlawanan itu diterima dan dibicarakan secara terbuka.* Dalam hal ini masyarakat yang bertikai, khususnya masyarakat Ambon dan masyarakat Buton, Bugis dan Makasar (BBM), harus dapat menerima perbedaan sebagai suatu dinamika kehidupan dan mengembangkan sikap akomodatif, permisif dan adaptif, terutama terhadap masyarakat pendatang. Resolusi-resolusi damai dan upaya-upaya islah harus terus diupayakan sambil membenahi sektor-sektor yang mengalami kerusakan. Konflik setiap waktu dapat mengarah kepada timbulnya konflik baru, maka sedini mungkin harus ditangkal. Untuk itu pelucutan senjata tajam atau alat-alat keke-

rasan lainnya terus dilanjutkan. Mekanisme yang eksplisit untuk merembukan kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang, terus dikembangkan agar para anggota dalam suatu kelompok interes secara terbuka mengakui kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Budaya kerjasama yang merupakan tradisi yang mementingkan persatuan dan kesatuan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan hubungan darah yang dikenal dengan *saudara sedarah atau saudara sekandung (Pelagandong)* perlu dihidupkan kembali. Dimana tradisi tersebut perbedaan-perbedaan dijumpatani secara kekeluargaan. Terus memberikan dorongan, agar otoritas-otoritas dari lembaga-lembaga tradisional dari pihak yang terlibat konflik mau membuat rekonsiliasi. Bilamana peran institusi-institusi tradisional sangat kuat, maka peran pemerintah hanya memperkuat/memper-teguh saja atau sebagai mediator. Hal itu dapat dilihat dari langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam merumuskan perdamaian Malino II di Kota Malino Sulawesi Selatan.

Kalau rekonsiliasi ini dapat tercipta, maka makna konflik menurut Lewis Coser, dapat berfungsi secara positif dalam meningkatkan integrasi sosial dapat terwujud di kota Ambon, sehingga kekhawatiran timbulnya disintegrasi bangsa serta gerakan-gerakan separatisme dapat dihindarkan.

Daftar Pustaka

Doyle Paul Johnson, 1999, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta, Gramedia.

Turner J.H., and Leonard Beeghly, *The Emergence of Sociology Theory*, The Doresy Press, 1981.

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Konflik Kekerasan, Perdamaian dan Upaya Pembangunan Pasca Konflik (Kasus Dayak Vs Madura)*, Makalah, Jakarta.

....., 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, M2 Print.

George Ritzer, *Sociology Theory*, Singapore, Mc. Geaw Hill, 1992.

H.D. Brototancoyo, 2001, *Kerusuhan Ambon dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta, Bulsak Edisi No. 10 Tahun 2001.

Sbimmas Polri, 2001, *Rekonsiliasi Pihak Yang Bertikai Antara Suku Dayak dan Suku Madura*, Makalah, Jakarta.

